

ABSTRAK

Adapun suatu tindakan guna menegakan atas suatu hukum tertentu dalam hal ini terkait aspek perikanan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan sehubungan utuh atas keberadaannya. Karena dengan tujuan guna untuk melakukan penyelamatan atas kepentingan negara yang bersifat nasional berbentuk sumber daya ikan dari pelaku atas suatu tindak pidana perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin (*illegal fishing*). Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah. Penelitian dilakukan terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang ada.

Hasil penelitian ini akan menyimpulkan bahwa Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Kemudian juga terkait hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Serta dimana negara perairan tidak boleh melakukan penahanan hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional

Kata Kunci : **Perikanan , KUHAP, ZEEI**